

**IMPLEMENTASI PENERTIBAN PKL OLEH SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA (SATPOL PP)
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2011
(Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar)**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai derajat
Sarjana S-1

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



PEBRI ISMI ANGGIYOWATI

A220100184

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1- Pabelan. Kartasura Telp (0271) 717414 fax : 715448 Surakarta 57102

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pebri Ismi Anggiyowati

NIM : A220100184

Fakultas/Jurusan : FKIP/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jenis : Skripsi

Judul : **IMPLEMENTASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2011 (Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten
Karanganyar)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*) mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis skripsi/pencipta.
3. Bersedia meminjam dan menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 26 Februari 2014

Yang menyatakan

Pebri Ismi Anggiyowati



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1- Pabelan. Kartasura Telp (0271) 717414 fax : 715448 Surakarta 57102

Surat Pernyataan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Agus Prasetyo, S.Pd., M.Pd.

NIP/NIK :

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Pebri Ismi Anggiyowati

NIM : A220100184

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 (Studi Kasus di
Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar)**

Naskah artikel tersebut layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 26 Februari 2014

Pembimbing

Agus Prasetyo, S.Pd., M.Pd.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 (Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar)

Pebri Ismi Anggiyowati, A220100184, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, xviii+189 halaman (termasuk lampiran)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dan mendeskripsikan implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar bermacam-macam. Adapun karakteristiknya adalah profesi pedagang kaki lima menjadi pekerjaan pokok, sebelum memilih berjualan pernah memiliki profesi lain, mempersiapkan modal tergantung dari barang dagangan yang dijual, keuntungan yang tidak menentu, tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak perlu memiliki keterampilan yang tinggi, berjualan barang yang beraneka ragam, menjual jasa, mulai berjualan ketika sore hari hingga malam hari, mempersiapkan peralatan dalam berjualan, membawa barang dagangannya dengan menggunakan kendaraan yang berbeda-beda, membawa barang dagangan dengan berjalan kaki, pedagang memiliki paguyuban, pedagang yang berjualan tidak bisa ditetapkan jumlahnya secara pasti. 2) Bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: Satpol PP sebelum melakukan penertiban mempelajari terlebih dahulu tugas dan fungsi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, melakukan himbauan atau sosialisasi, melakukan pendekatan secara personal, melakukan penertiban satu minggu sebanyak 2 hingga 3 kali, tidak dilengkapi peralatan pendukung, tidak melakukan tindakan keras, terkadang mengeluarkan suara keras untuk mengarahkan PKL yang sulit diatur, menindak tegas pedagang yang sulit diatur agar jera dan tidak melanggar aturan kembali, terkadang mengambil barang dagangan PKL yang sulit diarahkan, memberikan kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk mengambil barang dagangannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci: *implementasi, penertiban, pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)*

PENDAHULUAN

Berdagang merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal, mendorong masyarakat beralih ke sektor informal yang salah satunya menjadi PKL. Masyarakat berpendapat akan sangat mudah untuk melakukan aktivitas tersebut. Membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi PKL dianggap sebagai solusi yang tepat, walaupun keuntungan yang didapat relatif rendah.

Karanganyar menjadi salah satu kabupaten yang tidak bisa lepas dari keberadaan PKL. Terdapat belasan gerobak pedagang kaki lima (PKL) di Taman Pancasila. PKL itu pun ditertibkan petugas Satpol PP Karanganyar karena nekat berjualan di kawasan Taman tersebut (Solopos, 13 Agustus 2013). Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan penertiban yakni kembalinya PKL yang sudah direlokasi ke tempat semula. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi tersebut mempunyai daya tarik dan potensi yang besar untuk ditempati oleh PKL. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan tindakan relokasi dengan mengadopsi karakteristik PKL masing-masing dalam menentukan lokasi baru bagi pedagang.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk melakukan penertiban PKL berusaha mengoptimalkan peran Satpol PP. Berdasarkan pasal 25 ayat 1 Perda Nomor 9 Tahun 2011, disebutkan bahwa:

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satpol PP sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas yakni membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, mendorong peneliti untuk mengadakan kajian dengan tema penertiban PKL oleh Satpol PP. Peneliti lantas menfokuskan tema penelitian

menjadi implementasi penertiban PKL oleh Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar.

Peneliti untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini adalah kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak bulan November 2013 sampai dengan Februari 2014.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus tunggal terpancang. Data yang diperoleh dengan suatu metode dilengkapi, diperkuat, dan disempurnakan dengan penggunaan metode lain seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi atau pencatatan arsip. Penelitian ini dikatakan strategi studi kasus tunggal terpancang karena terarah pada satu karakteristik objek penelitian. Dalam studi kasus tunggal terpancang agar pencarian data lebih terarah, maka kasus yang hendak diungkap perlu dirumuskan secara cermat. Kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik pedagang kaki lima di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar.
2. Bentuk-bentuk implementasi penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar.

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting untuk memperoleh data penelitian. Menurut Hadi (1989:89), pengumpulan data adalah memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan reliabel. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi. Menurut Walgito (2002:27), pengertian metode observasi yaitu metode penelitian yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan panca indera sebagai alat untuk menangkap secara langsung kejadian yang terjadi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif dilakukan terhadap aktivitas pedagang serta kegiatan penertiban PKL oleh Satpol PP di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar.
2. Wawancara. Menurut Afifudin dan Saebani (2009:131), wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin. Langkah wawancara terpimpin dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau informan untuk dijawab berdasarkan realita yang dialaminya. Wawancara dilakukan kepada informan guna menghimpun data mengenai implementasi yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL di Taman Pancasila.
3. Dokumentasi/Pencatatan Arsip. Menurut Afifuddin dan Saebani (2009:141), dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Sugiyono (2005:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini pencatatan dokumen digunakan untuk memperoleh arsip mengenai pelaksanaan penertiban PKL yang selama ini pernah dilakukan oleh Satpol PP di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar. Arsip atau

dokumentasi tersebut secara lebih khusus yaitu mengenai data jumlah Satpol PP, data kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP, data kinerja Satpol PP, dan data jumlah PKL.

Sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber (informan), tempat/peristiwa dan dokumen/arsip. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk mengetahui keabsahan datanya. Sementara itu, analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Langkah dalam analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik PKL di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar

Temuan hasil penelitian menyimpulkan bahwa karakteristik PKL di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar antara lain:

- a. Profesi PKL menjadi pekerjaan pokok. Kebanyakan dari para pedagang tidak memiliki pekerjaan lain selain berdagang.
- b. PKL sebelum memilih berjualan di Taman Pancasila, pernah memiliki profesi lain. Hal ini dibuktikan dengan pedagang yang pernah berprofesi sebagai petani atau buruh.
- c. PKL mempersiapkan modal tergantung dari barang dagangan yang dijual. Pedagang yang menjual barang-barang mahal, maka modal yang dibutuhkan juga tinggi begitu juga sebaliknya.
- d. PKL mendapatkan keuntungan yang tidak menentu. Hal ini disebabkan keuntungan yang didapatkan pedagang, tergantung dari ramai dan tidaknya pengunjung yang berdatangan ke Taman Pancasila.
- e. PKL memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Pedagang kebanyakan berpendidikan SMP dan SMA.
- f. PKL tidak perlu memiliki keterampilan yang tinggi.
- g. PKL berjualan barang yang beraneka ragam. Barang yang dijual berupa makanan, minuman, pakaian, peralatan memasak, peralatan *make-up*, mainan anak-anak, aksesoris, sandal, sepatu, peralatan sekolah, serta tas.

- h. PKL juga menjual jasa. Pedagang yang menjual jasa dengan menyewakan maianan anak-anak seperti odong-odong, *scooter*, kemidi putar, pemancingan, serta mandi bola.
- i. Pedagang mulai berjualan ketika sore hari hingga malam hari.
- j. PKL mempersiapkan peralatan dalam berjualan. Peralatan yang dipersiapkan berupa meja, *pikulan*, *bronjong*, tikar ataupun tenda.
- k. Pedagang membawa barang dagangannya dengan menggunakan kendaraan yang berbeda-beda. Pedagang ada yang menggunakan sepeda, sepeda motor, mobil, mobil *pick up*, atau truk.
- l. Pedagang membawa barang dagangan dengan berjalan kaki. Hal ini dilakukan bagi pedagang yang tidak memiliki kendaraan, serta barang dagangan yang sedikit.
- m. Pedagang memiliki paguyuban. Paguyuban pedagang dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi, sekaligus sebagai sarana informasi.
- n. Pedagang yang berjualan tidak bisa ditetapkan jumlahnya secara pasti. Pedagang di hari libur atau ketika di Taman Pancasila terdapat acara khusus, akan lebih banyak dibandingkan hari biasa.

Karakteristik PKL di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar secara garis besar hampir sama dengan pendapat Julissar yang dikutip Demartoto dkk. (2006:18). Perbedaananya karakteristik PKL di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar lebih ditegaskan waktu berjualan dan kegiatan yang dilakukan. Karakteristik PKL menurut Jullisar sebagaimana dikutip oleh Demartoto dkk. (2006:18) adalah:

- a. Umumnya tergolong angkatan kerja produktif.
- b. Umumnya sebagai mata pencaharian pokok.
- c. Tingkat pendidikan relatif rendah.
- d. Pekerjaan sebelumnya rata-rata sebagai petani atau buruh.
- e. Permodalannya lemah dan omzet penjualannya kecil.
- f. Barang dagangan umumnya adalah bahan pangan, sandang, dan kebutuhan sekunder.

- g. Tingkat pendapatannya relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan keluarga di perkotaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PKL adalah pedagang yang memperjualbelikan barang atau jasa yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Hal tersebut sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan PKL pasal 1 Angka 4, yang menjelaskan bahwa:

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual dan/atau jasa yang berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

PKL diberi kebijakan oleh pemerintah setempat untuk menempati kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar sebagai lokasi berjualan, tetapi tidak boleh melanggar larangan yang telah ditetapkan. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 pasal 10 menjelaskan bahwa dalam melakukan usahanya PKL dilarang:

- a. Merombak, menambah, mengubah fungsi, dan fasilitas PKL yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
 - b. Mendirikan bangunan secara semi permanen dan/atau permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan.
 - c. Memindahtangankan izin tempat usaha PKL kepada pihak lain.
 - d. Menempati lahan atau lokasi untuk kegiatan tempat tinggal.
 - e. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan.
2. Bentuk-bentuk Implementasi Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar

Temuan hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar sebagaimana penjabaran di bawah ini:

- a. Satpol PP sebelum melakukan penertiban mempelajari terlebih dahulu tugas dan fungsi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011.

- b. Satpol PP melakukan himbauan atau sosialisasi sebelum melakukan penertiban kepada PKL di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar.
- c. Satpol PP memberikan himbauan atau sosialisasi bisa secara langsung ataupun memberikan informasi kepada pengurus paguyuban pedagang.
- d. Satpol PP dalam penertiban melakukan pendekatan secara personal.
- e. Satpol PP melakukan penertiban kepada PKL di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar, satu minggu sebanyak 2 hingga 3 kali.
- f. Satpol PP dalam melakukan penertiban di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar tidak dilengkapi peralatan pendukung seperti tameng, senjata api atau pentungan.
- g. Satpol PP dalam melakukan penertiban di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar tidak melakukan tindakan keras, seperti memukul atau menendang. Hal itu sebagai perwujudan terhadap hak asasi manusia.
- h. Satpol PP dalam melakukan penertiban di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar, terkadang mengeluarkan suara keras untuk mengarahkan PKL yang sulit diatur. PKL yang sulit untuk diarahkan, harus ditindak tegas agar jera dan tidak melanggar aturan kembali.
- i. Satpol PP dalam penertiban di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar, terkadang mengambil barang dagangan PKL yang sulit diarahkan.
- j. Satpol PP memberikan kesempatan kepada PKL yang barang dagangannya diambil, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap PKL sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011. Menurut Perda Nomor 9 Tahun 2011 pasal 25 ayat 2 Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, penegakkan Perda dan perlindungan masyarakat. Fungsi Satpol PP dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 pasal 25 ayat 3 adalah Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya melakukan penertiban juga harus menggunakan pendekatan persuasif, menindak dengan tegas tanpa kekerasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melakukan sosialisasi.

Prosedur penertiban PKL juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan penertiban PKL pun dilakukan sesuai perintah dari Kepala Satpol PP. Satpol PP melakukan penertiban sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Perda Nomor 9 Tahun 2011 pasal 25 yaitu menegakkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, terlihat bahwa temuan dalam penelitian ini bisa dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai kajian teorinya.

KESIMPULAN

1. Karakteristik PKL di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:
 - a. Profesi PKL menjadi pekerjaan pokok. Kebanyakan dari para pedagang tidak memiliki pekerjaan lain selain berdagang. Para pedagang hanya mengharapkan keuntungan dari berjualan di Taman Pancasila.
 - b. PKL sebelum memilih berjualan di Taman Pancasila, pernah memiliki profesi lain. Hal ini dibuktikan dengan pedagang yang pernah berprofesi sebagai petani atau buruh.
 - c. PKL mempersiapkan modal tergantung dari barang dagangan yang dijual. Pedagang yang menjual barang-barang mahal, maka modal yang dibutuhkan juga tinggi. Pedagang yang menjual barang dagangan yang ringan, maka modal yang dibutuhkan juga relatif kecil.
 - d. PKL mendapatkan keuntungan yang tidak menentu. Hal ini disebabkan keuntungan yang didapatkan pedagang, tergantung dari ramai dan tidaknya pengunjung yang berdatangan ke Taman Pancasila.
 - e. PKL memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Pedagang kebanyakan berpendidikan SMP dan SMA.
 - f. PKL tidak perlu memiliki keterampilan yang tinggi.
 - g. PKL berjualan barang yang beraneka ragam. Barang yang dijual berupa makanan, minuman, pakaian, peralatan memasak, peralatan *make-up*, mainan anak-anak, aksesoris, sandal, sepatu, peralatan sekolah, serta tas.

- h. PKL juga menjual jasa. Pedagang yang menjual jasa dengan menyewakan maianan anak-anak seperti odong-odong, *scooter*, kemidi putar, pemancingan, serta mandi bola.
 - i. Pedagang mulai berjualan ketika sore hari hingga malam hari.
 - j. PKL mempersiapkan peralatan dalam berjualan. Peralatan yang dipersiapkan berupa meja, *pikulan*, *bronjong*, tikar ataupun tenda.
 - k. Pedagang membawa barang dagangannya dengan menggunakan kendaraan yang berbeda-beda. Pedagang ada yang menggunakan sepeda, sepeda motor, mobil, mobil *pick up*, atau truk.
 - l. Pedagang membawa barang dagangan dengan berjalan kaki. Hal ini dilakukan bagi pedagang yang tidak memiliki kendaraan, serta barang dagangan yang sedikit.
 - m. Pedagang memiliki paguyuban. Paguyuban pedagang dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi, sekaligus sebagai sarana informasi.
 - n. Pedagang yang berjualan tidak bisa ditetapkan jumlahnya secara pasti. Pedagang di hari libur atau ketika di Taman Pancasila terdapat acara khusus, akan lebih banyak dibandingkan hari biasa.
2. Bentuk-bentuk Implementasi penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:
- a. Satpol PP sebelum melakukan penertiban mempelajari terlebih dahulu tugas dan fungsi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011.
 - b. Satpol PP melakukan himbauan atau sosialisasi sebelum melakukan penertiban kepada PKL di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar.
 - c. Satpol PP memberikan himbauan atau sosialisasi bisa secara langsung ataupun memberikan informasi kepada pengurus paguyuban pedagang.
 - d. Satpol PP dalam penertiban melakukan pendekatan secara personal.
 - e. Satpol PP melakukan penertiban kepada PKL di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar, satu minggu sebanyak 2 hingga 3 kali.

- f. Satpol PP dalam melakukan penertiban di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar tidak dilengkapi peralatan pendukung seperti tameng, senjata api atau pentungan.
- g. Satpol PP dalam melakukan penertiban di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar tidak melakukan tindakan keras, seperti memukul atau menendang. Hal itu sebagai perwujudan terhadap hak asasi manusia.
- h. Satpol PP dalam melakukan penertiban di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar, terkadang mengeluarkan suara keras untuk mengarahkan PKL yang sulit diatur. PKL yang sulit untuk diarahkan, harus ditindak tegas agar jera dan tidak melanggar aturan kembali.
- i. Satpol PP dalam penertiban di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar, terkadang mengambil barang dagangan PKL yang sulit diarahkan.
- j. Satpol PP memberikan kesempatan kepada PKL yang barang dagangannya diambil, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

SARAN

- 1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karanganyar hendaknya bisa lebih tegas dalam menertibkan PKL agar PKL mau ditata dengan baik dan kota bisa terlihat rapi dan nyaman.
- 2. Bagi pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan peraturan dan melakukan sosialisasi ke berbagai daerah agar para pedagang kaki lima mengetahui secara pasti mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
- 3. Bagi PKL di kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar hendaknya bisa menaati peraturan-peraturan yang berlaku demi kepentingan bersama.
- 4. Bagi penelitian berikutnya semoga ada pengkajian mengenai penertiban dan penataan PKL, sehingga bisa diketahui cara menertibkan PKL sekaligus penataan PKL yang benar dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, H. dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Demartoto, dkk. 2006. *Aspek Hukum Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- Solopos. 2013. "Penertiban PKL Belasan Pedagang Taman Pancasila Dikukut" (<http://www.solopos.com/2013/08/13/penertiban-pkl-belasan-pedagang-taman-pancasila-dikukut.html>). Diakses pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 jam 10.11WIB.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Walgito, Bimo. 2002. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi.